

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan I 2025, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 1,60% (mtm) lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 1,65% (mtm). Dengan pencapaian tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 0,81% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Maret 2025 terutama bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 1,06%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yaitu tarif listrik sebesar 1,05% dan kontrak rumah sebesar 0,01%.

Di sisi lain, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,40% (mtm) dengan komoditas andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,14% (mtm), cabai rawit 0,05% (mtm), telur ayam ras 0,03% (mtm); daging ayam ras, beras, dan bawang putih masing-masing sebesar 0,02% (mtm); dan daging sapi 0,01% (mtm). Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi (mtm), antara lain tomat, kangkung, dan wortel masing-masing sebesar 0,01%.

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 1,77% dengan IHK sebesar 108,30 dan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,24% dengan IHK sebesar 105,64%. Di sisi lain, apabila dilihat secara mtm, inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 1,94% dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 1,10%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-I 2025 yaitu:

1. Berkurangnya pasokan bawang merah dan cabai rawit di wilayah produsen akibat cuaca menyebabkan kenaikan harga di pasaran. Pada bulan Januari, sebagian besar wilayah Jawa Barat mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, terutama di wilayah tengah dan selatan. Kondisi ini berangsur menurun pada Februari, meskipun masih ada beberapa daerah yang tetap mendapatkan curah hujan tinggi. Memasuki Maret, curah hujan semakin berkurang, terutama di wilayah utara, yang mulai mengalami kondisi kering dengan curah hujan rendah hingga sangat rendah.
2. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexite sejak 1 Januari 2025, namun jenis Pertamax Series dan Dex Series kembali turun pada bulan Maret dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.
3. Pemerintah Kota Bandung menetapkan kenaikan tarif PDAM untuk golongan rumah tangga 2A3, 2A4, dan 2A5 yang berlaku sejak Januari 2025 (Pembayaran Februari 2025) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.31/Kep.1531-Ek/2024.
4. Harga emas dunia masih terus menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai level

tertinggi;

5. Mewabahnya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (MPK) sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi daging sapi/kerbau.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb:

1. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 5 kali selama Triwulan I;
2. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota setiap hari yang disajikan dalam SILINDA JABAR;
3. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan I;
4. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan.
5. Pengelolaan CPPD oleh BULOG per 31 Maret 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 2. CPPD Provinsi sebesar 2.218,23 ton beras dan
 3. CPPD Kabupaten/Kota antara lain:
 - o Beras: 2.966,63 ton
 - o Gabah: 44,77 ton
 - o Gula Pasir: 7 ton
 - o Telur ayam: 7 ton
 - o Minyak Goreng: 190,38 KL
1. Penyaluran bantuan pangan SPHP sejumlah 7.220.830 Kg sampai dengan 7 Februari 2025 dan masih menunggu arahan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penyaluran selanjutnya;
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 22 kali;
3. Operasi Pasar Pangan Murah dilaksanakan di 24 titik Kantor Pos dengan komoditas Minyakita, Bawang Putih, Gula Konsumsi, Daging Kerbau Beku, Beras SPHP, dan komoditas lainnya;
4. Mobil Pangan Keliling Jawa Barat (Mobil Paling Jawara) dilaksanakan sebanyak 17 kali;
5. Penyerapan Gabah/Beras PSO per 31 Maret 2025 sebanyak 107.615,736 Ton;
6. Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 687.500 Kg;
7. Optimalisasi distribusi pangan di 119 Kios Pangan;
8. Gelar Produk Pasa Tani sebanyak 8 kali;
9. Pengembangan komoditas tanaman cabai dan bawang merah melalui optimalisasi peran Petani Andalan dan Petani Champion;
10. Konservasi Lahan di DAS Citarum dengan Metode Teras Bangku pada Kawasan Hortikultura di DAS Citarum;
11. Kemitraan Usaha Komoditas Hortikultura dengan PT. Food Station, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan Bank BRI;
12. Gerakan pengendalian OPT terutama di wilayah yang terancam dan terdampak;
13. Kegiatan pertanian di dalam *screenhouse*, *Smart Farming/Green House/Smart Green House*;
14. Optimalisasi pertanian cabai pada kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), baik di demplot maupun di pekarangan rumah anggota dan Masyarakat;

Optimalisasi pemanfaatan *cold storage* bawang merah di Kabupaten Sentra (Bandung)

15.

dan pelaku-pelaku besar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah, dan cabai masih rentan dalam menghadapi anomali maupun gangguan cuaca sementara pada komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan;
2. Penguatan dan pemutakhiran data ketersediaan dan kebutuhan serta data harga komoditas pangan strategis;
3. Pengelolaan stok belum optimal yang menyebabkan kekurangan saat bukan musim panen;
4. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, seperti bawang putih, jagung, gandum, gula pasir, dan lain-lain;
5. Tingginya hasil panen yang hilang dalam rantai pasok pangan;
6. Monitoring progam/kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah;
7. Antisipasi kondisi perekonomian global yang dapat berpengaruh terhadap harga komoditas andil inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-I 2025 di antaranya :

1. Stabilitas harga komoditas pangan strategis, melalui kegiatan pemantauan harga dan intervensi pasar serta penguatan distribusi pangan, sebagai berikut :
 - a. Pemantauan dan pelaporan harga komoditas pangan strategis secara harian melalui aplikasi Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan aplikasi Sistem Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan RI serta melakukan sidak pasar ke pasar tradisional, retail, modern, dan Distributor, khususnya untuk komoditas yang masih mengalami kenaikan harga dan berada di atas Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - b. Intervensi pasar, melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), Pasar Tani, Pasar Pasisian Leuweung, Bazar Perikanan, Pasar Minggon Industri dan Perdagangan (Pasamoan).
 - c. Penguatan distribusi pangan, melalui kegiatan Kios Pangan, Mobil Pangan Keliling, pemberian Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) pada GPM, dan Pasar Lelang Komoditas untuk mempertemukan *Champion* komoditas pangan strategis/Produsen dengan pembeli melalui mekanisme pasar lelang sehingga terjadi pemerataan harga pangan.
2. Optimalisasi penyerapan Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung di tingkat Petani, bekerjasama dengan BULOG Kanwil Jawa Barat, 27 Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lainnya.
3. Gerakan tanam pangan cepat panen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan kondisi tertentu.

Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap

4. komoditas pangan impor dan mendukung upaya diversifikasi pangan.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui wadah TPID.